

Analysis of Determinants on Village Fund Management Accountability

Dias Widiawati, Nur Laila Yuliani , Anissa Hakim Purwantini

Department of Accounting, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

 nurlailay.feb@ummgl.ac.id

 <https://doi.org/10.53017/ujeb.128>

Received: 15/02/2022

Revised: 27/03/2022

Accepted: 29/03/2022

Abstract

Village fund management accountability is the most important focal point for village officials because it shows responsibility and success in managing village funds. Accountability is an important part in providing reports and being accountable for any success or failure in carrying out the goals that have been set by the organization previously. Factors that influence the success of village fund management accountability are village apparatus competence, control system, use of technology, community participation, village financial system and transparency. This study aims to empirically test and analyze the effect of village apparatus competence, internal control system, technology utilization, community participation, village financial system and transparency on village fund management accountability in villages in Candimulyo District. The sample of this study amounted to 108 respondents, where the sampling technique in this study used purposive sampling. The data collection method used is a questionnaire. The hypothesis testing technique in this study uses multiple linear regression analysis, F-test and t-test. Based on the tests that have been carried out, the results of the study show that the competence of the village apparatus has a positive effect on the accountability of village fund management. Based on this research, the internal control system, the use of information technology, community participation, the village financial system and transparency have no effect on the accountability of village fund management.

Keywords: Village Apparatus Competence; Internal Control System; Utilization of Information Technology; Society participation; Village Financial System; Transparency; Village Fund Management Accountability

Analisis Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Abstrak

Akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi titik fokus terpenting bagi aparatur desa karena hal ini menunjukkan tanggungjawab dan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas menjadi bagian penting dalam memberikan laporan dan mempertanggungjawabkan setiap keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan organisasi sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian, pemanfaatan teknologi, partisipasi masyarakat, sistem keuangan desa dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi, partisipasi masyarakat, sistem keuangan desa dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Candimulyo. Sampel penelitian ini berjumlah 108 responden, dimana teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Teknik pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, uji-F dan uji-t. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penelitian ini, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, sistem keuangan desa dan transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata kunci: Kompetensi Aparatur Desa; Sistem Pengendalian Internal; Pemanfaatan Teknologi Informasi; Partisipasi Masyarakat; Sistem Keuangan Desa; Transparansi; Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

1. Pendahuluan

Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban untuk melaporkan serta bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan dalam melaksanakan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa harus menerapkan prinsip tata kelola yang akuntabel yaitu pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa tentang status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan. Desa dijadikan sebagai titik utama peningkatan pembangunan. Pemerintah pusat dalam rangka mensukseskan pembangunan desa memberikan anggaran berupa dana desa. Pemerintah pusat juga berharap dengan adanya dana desa program yang diselenggarakan akan lebih cepat tersalurkan ke masyarakat, sehingga bisa tercapai pembangunan desa yang maju.

Prinsip akuntabilitas sebagai pedoman dalam menjalankan kewajibannya dan semua yang diselenggarakan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi titik fokus terpenting bagi aparatur desa karena hal ini menunjukkan tanggungjawab dan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa.

Pada tahun 2020, alokasi dana desa di Kabupaten Magelang sebesar Rp391.044.107.982 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar empat puluh empat juta seratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) yang telah disalurkan ke 367 desa yang tersebar di 21 Kecamatan. Kecamatan Candimulyo mendapatkan Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2020 sebesar Rp19.575.350.000 (sembilanbelas miliar limaratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) [1].

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan akuntabilitas pengelolaan dana desa, salah satu faktornya yaitu kompetensi aparatur desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa harus didukung dengan kompetensi aparatur desa yang memadai agar tujuan yang ingin dicapai organisasi dapat terwujud. Tanpa adanya perangkat desa yang memiliki kompetensi maka organisasi tidak akan dapat mencapai tujuannya. Kompetensi aparatur desa yang baik juga akan menciptakan hasil laporan keuangan yang akuntabel. Semakin baik kompetensi yang dimiliki perangkat desa dapat mengurangi terjadinya kecurangan dalam melakukan pengelolaan dana desa.

Pengendalian internal merupakan suatu cara atau prosedur yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasionalnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan supaya dapat mencapai tujuan organisasi. Akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik diwujudkan dengan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Pengendalian internal bertujuan untuk menjaga proses operasional desa agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang saat ini dimanfaatkan oleh organisasi pemerintah untuk mencapai tujuan organisasinya dan memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola

keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada masyarakat. Pengelolaan dana desa juga membutuhkan adanya peran partisipasi dari masyarakat untuk ikut serta mengawasi penggunaan dana desa. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk memberitahu kepada masyarakat sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah terhadap penyaluran dana desa. Keterlibatan masyarakat sangat membantu dalam proses pelaksanaan program-program pemerintah salah satunya pembangunan infrastruktur pedesaan.

Pemerintah pusat dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menciptakan sistem informasi keuangan desa. Tujuan dari sistem informasi keuangan desa untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa dalam mengelola dana desa. Penerapan sistem ini juga dapat membantu perangkat desa untuk mempermudah pengerjaannya mengelola dana desa. Transparansi sangat penting diterapkan pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Adanya transparansi pemerintah desa dengan masyarakat akan berdampak terhadap tata kelola pemerintah yang baik.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian [2], yang meneliti tentang pengelolaan dana desa dengan menggunakan teori *stewardship*. Keterkaitan teori *stewardship* terhadap penelitian ini dapat dijelaskan bahwa eksistensi Pemerintah Desa (*steward*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan melaksanakan tugas untuk kepentingan masyarakat (*principa*). Pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya untuk membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Eksistensi pemerintah desa sebagai suatu lembaga yang dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, sehingga pemerintah desa harus memberikan pelayanan yang baik untuk publik. Teori *stewardship* dapat memotivasi pemerintah desa untuk memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya kepada masyarakat. Sehingga tujuan organisasi untuk mensejahterakan masyarakat dapat dicapai secara maksimal.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penambahan variabel Transparansi [3] dan objek penelitiannya di Kecamatan Candimulyo. Kecamatan Candimulyo dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa pemerintah desa kurang terbuka kepada masyarakat. Banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah desa tanpa diketahui oleh masyarakat. Sumber Daya Manusia yang ada dalam perangkat desa juga kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang penyusunan laporan keuangan. Kurangnya pengetahuan tersebut karena sebagian besar perangkat desa yang mengelola anggaran dana desa belum sepenuhnya mendapatkan pelatihan. Dengan demikian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Candimulyo masih perlu di tingkatkan.

Motivasi penelitian ini adalah mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat, Sistem Keuangan Desa dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa pada Kecamatan Candimulyo.

2. Metode

2.1. Populasi dan sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa di Kecamatan Candimulyo terdiri dari 19 desa yang mendapatkan dana desa. Teknik sampel yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Kriteria sampel yang digunakan adalah perangkat desa yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pengelolaan dana desa di Kecamatan Candimulyo dan memiliki masa kerja minimal 1 tahun.

2.2. Definisi dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel dan pengukuran variabel pada penelitian ini berdasarkan literature dan telaah penelitian terdahulu yang digunakan. Pengukuran variabel menggunakan skala likert 1-5, yaitu skala 1= Sangat Tidak Setuju sampai skala 5 = Sangat Setuju. Definisi operasional dan pengukuran variabel dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (APDD)	Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap ketentuan undang-undang [4]	Instrumen penelitian ini mengacu pada penelitian [5] yang terdiri dari 8 item pernyataan dengan indikator: a. Kejujuran dan keterbukaan informasi. b. Kepatuhan dalam pelaporan. c. Kesesuaian prosedur d. Kecakupan informasi e. Ketepatan penyampaian
2.	Kompetensi Aparatur Desa (KAD)	Kompetensi merupakan kemampuan seseorang dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperoleh melalui proses pendidikan, pengetahuan atau pengalaman [6].	Instrumen penelitian ini mengacu pada penelitian [5] yang terdiri dari 17 item pernyataan dengan indikator: a. Pengetahuan. b. Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan. c. Keahlian teknis. d. Kemampuan mencari solusi. e. Inisiatif dalam bekerja. f. Keramahan dan kesopanan.
3.	Sistem Pengendalian Internal (SPI)	Sistem Pengendalian Internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan jaminan atas tercapainya suatu tujuan yang berkaitan dengan efektifitas dan efisien operasi, reliabilitas pelaporan keuangan dan ketentuan yang berlaku [7].	Instrumen penelitian ini mengacu pada penelitian [5] yang terdiri dari 14 item pernyataan dengan indikator: a. Kejujuran dan keterbukaan informasi. b. Kepatuhan dalam pelaporan. c. Kesesuaian prosedur. d. Kecakupan informasi. e. Ketepatan penyampaian laporan.
4.	Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)	Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang berupa hardware, software, dan useware dimana komponen tersebut digunakan dengan tujuan untuk mengolah suatu data agar mendapatkan	Instrumen penelitian ini mengacu pada penelitian [5] yang terdiri dari 7 item pernyataan dengan indikator: a. Intensitas pemanfaatan b. Frekuensi pemanfaatan.

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel
5.	Partisipasi Masyarakat (PM)	informasi yang berkualitas [6]. Partisipasi merupakan keikutsertaan individu atau sekelompok orang dalam membantu program kerja dalam suatu kegiatan [8].	c. Jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Instrumen penelitian ini mengacu pada penelitian [5] dengan yang terdiri dari 9 item pernyataan dengan indikator: a. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program. b. Terlibat dalam rapat c. Melaporkan. d. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran.
6.	Sistem Keuangan Desa (SKD)	Sistem keuangan desa merupakan sistem yang digunakan untuk membantu memudahkan menata pelaporan pengelolaan dana desa [9].	Instrumen penelitian ini mengacu pada penelitian [10] yang terdiri dari 10 item pernyataan dengan indikator: a. Kemudahan dalam penggunaan. b. Fitur layanan. c. Pemanfaatan penggunaan perangkat lunak.
7.	Transparansi (T)	Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik [11]	Instrumen penelitian ini mengacu pada penelitian [12] yang terdiri dari 7 item pernyataan dengan indikator: a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen. b. Kejelasan dan kelengkapan informasi. c. Keterbukaan proses. d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

2.3. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis. Pengujian validitas menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) dengan kriteria nilai *KMO and Barlett's test* dan nilai *cross loading* > 0,50. pernyataan penelitian dikatakan valid. Sedangkan untuk pengujian reliabilitas *Cronbach's Alpha* dengan kriteria dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70. Pengujian hipotesis meliputi uji koefisien determinasi (R²) dengan melihat nilai *adjusted r square*, uji ketepatan model dengan uji F dan uji t, dengan tingkat signifikansi 5% [13]. Berikut persamaan regresi linier berganda:

$$APDD = \alpha + \beta_1KAD + \beta_2SPI + \beta_3PTI + \beta_4PM + \beta_5SKD + \beta_6T + e \quad (1)$$

Keterangan:

- APDD = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
- A = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_6$ = Koefisien Regresi
- KAD = Kompetensi Aparatur Desa
- SPI = Sistem Pengendalian Internal
- PTI = Pemanfaatan Teknologi Informasi
- PM = Partisipasi Masyarakat
- SKD = Sistem Keuangan Desa
- T = Transparansi
- E = Standar Error.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Uji Validitas

Pengujian validitas menunjukkan bahwa indikator-indikator dari variabel penelitian memiliki nilai *KMO and Barlett's test* dan nilai *cross loading* > 0,50 sehingga dikatakan valid. Namun terdapat 10 pernyataan yang tidak valid atau sebesar 13,8% sehingga pernyataan tersebut tidak dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

3.2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menunjukkan variabel kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, sistem keuangan desa, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki *Cronbach's Alpha* > 0,70. Dapat disimpulkan bahwa semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa	0,936	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0,933	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,871	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0,917	Reliabel
Sistem Keuangan Desa	0,950	Reliabel
Transparansi	0,888	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,932	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

3.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis nilai koefisien regresi dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Koefisien Regresi

Keterangan	B	Unstandardized	Standardized	t	Sig.
		Coefficients	Coefficients		
		Std. Error	Beta		
(Constant)	8,161	3,894		2,096	0,039
Kompetensi Aparatur Desa	0,453	0,080	0,567	5,679	0,000
Sistem Pengendalian Internal	-0,035	0,067	-0,039	-0,529	0,598
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,147	0,119	0,111	1,232	0,221
Partisipasi Masyarakat	0,084	0,122	0,083	0,684	0,495
Sistem Keuangan Desa	0,094	0,089	0,117	1,054	0,294
Transparansi	-0,061	0,138	-0,046	-0,441	0,660

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil koefisien regresi pada tabel 3 diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$APDD = 8,161 + 0,453KAD - 0,035SPI + 0,147PTI + 0,084PM + 0,094SKD - 0,061T + e \quad (2)$$

3.4. Uji Hipotesis

3.4.1. Uji R² (Koefisien Determinasi)

Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan *Adjusted R Square* sebesar 53,3%. Hal ini berarti variabel Kompetensi Aparatur Desa (APD), Sistem Pengendalian Internal (SPI), Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI), Partisipasi Masyarakat (PM), Sistem Keuangan Desa (SKD), dan Transparansi (T) mampu menjelaskan variabel Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa (APDD) sebesar 53,3 % sedangkan sisanya 46,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain dari luar penelitian ini sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Uji koefisien determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,748	0,559	0,533	2,695

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

3.4.2. Uji F (*goodness of fit test*)

Hasil pengujian F menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$ dan nilai Fhitung sebesar 21,339. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian pada penelitian ini layak atau fit. Hasil uji f dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji F

Keterangan	Sum of Squares	DF	Mean Square	F	Sig.
Regression	930,432	6	155,072	21,339	0,000b
Residual	733,976	101	7,267		
Total	1664,407	107			

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

3.4.3. Uji t

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 6. Ketentuan uji t dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df=n-1$.

Tabel 6. Uji t

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa	5,679	1,98238	0,000	H1 diterima
Sistem Pengendalian Internal	-0,529	1,98238	0,598	H2 tidak diterima
Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,232	1,98238	0,221	H3 tidak diterima
Partisipasi Masyarakat	0,684	1,98238	0,495	H4 tidak diterima
Sistem Keuangan Desa	1,054	1,98238	0,294	H5 tidak diterima
Transparansi	-0,441	1,98238	0,660	H6 tidak diterima

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

3.5. Pembahasan

3.5.1. Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini terjadi karena aparatur desa yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang tinggi maka akan mampu mengelola dana desa dengan baik. Tingginya tingkat kompetensi aparatur desa dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pengelolaan dana desa yang dimiliki oleh aparatur desa, selain itu kompetensi dapat dibentuk dengan adanya pelatihan dari pemerintah daerah untuk melatih aparatur desa terkait dengan penyusunan laporan keuangan dana desa. Hasil ini sesuai dengan *teori stewardship* yang menyatakan rakyat sebagai *principal* dan aparatur desa sebagai *steward*. Sesuai dengan konsep tersebut, seorang aparatur desa harus akuntabel dan berintegritas terkait dengan tata kelola keuangan desa, mereka harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam menjalankan serta bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan [14] yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian [6] yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3.5.2. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut terjadi karena lemahnya sistem pengendalian internal yang ada di dalam pemerintahan desa sehingga pertanggungjawaban pengelolaan dana desa belum berjalan dengan baik. Lemahnya sistem pengendalian internal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan aparatur desa tentang sistem pengendalian internal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengambilan keputusan internal perangkat desa. Hal tersebut bisa mempengaruhi tanggungjawab dari aparatur desa dalam melakukan pekerjaannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian [5] yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian [14], [15], [16], dan [17] yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3.5.3. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Di kantor desa disediakan jaringan internet yang digunakan untuk membantu mempermudah pekerjaan aparatur desa. Namun pada kenyataannya aparatur desa jika didalam penyusunan laporan keuangan mengalami kesulitan mereka tidak mencari solusi melalui jaringan internet namun mereka bertanya kepada aparatur desa yang paham terkait pembuatan laporan keuangan. Hal ini tidak sejalan dengan teori *stewardship*, yang menyatakan bahwa dalam memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal, aparatur desa akan terbantu dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian [2] dan [17] yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian [6], [18], [7] yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3.5.4. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aparatur desa dalam pengelolaan dana desa belum melibatkan masyarakat dalam pembuatan rencana anggaran maupun untuk melakukan pengawasan dalam penganggaran dana desa. Hal tersebut berarti walaupun dalam pengelolaan dana desa tidak melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan penganggaran dana desa tetapi pengelolaan dana desa tetap berjalan atau harus tetap dilakukan oleh aparatur desa. Hal ini tidak sejalan dengan teori *stewardship*, yang menyatakan bahwa pemerintah desa yang bertindak sebagai *steward* (pelayan) yang dipercayai masyarakat sebagai lembaga untuk memenuhi kepentingan publik. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian [2] dan [17], yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian [19] yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3.5.5. Pengaruh sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem keuangan desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Siskeudes dapat mengurangi resiko penyimpangan dan menghindarkan aparatur desa dari manipulasi

pertanggungjawaban dana desa, selain itu Siskeudes dapat mengurangi resiko kesalahan pelaporan keuangan desa. Namun dapat terjadi kemungkinan bahwa aparatur desa salah dalam penginputan data yang dapat menyebabkan akuntabilitas tidak bisa tercapai dengan maksimal. Hal ini tidak sejalan dengan teori *Stewardship*, dimana sistem keuangan desa dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan untuk mempermudah pekerjaan aparatur desa dalam mengelola keuangan dana desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian [20] yang menyatakan bahwa sistem keuangan desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian [21], [22] yang menyatakan bahwa sistem keuangan dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3.5.6. Pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan hasil pengujian ini menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Transparansi laporan keuangan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa berupa informasi keuangan yang di pajang di kantor. Namun adanya transparansi yang dilakukan oleh aparatur desa tidak menjamin bahwa masyarakat itu paham tentang informasi keuangan tersebut. Sehingga masyarakat tidak bisa memberikan masukan kepada aparatur desa dalam pengelolaan dana desa karena kurangnya pemahaman terhadap informasi yang di sediakan tersebut Hal ini tidak sejalan dengan teori *stewardship*, dimana aparatur desa memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam memberikan keterbukaan atau transparansi terkait apa yang telah dilakukan pemerintah desa Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian [3], yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian [11] yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, Siskeudes dan transparansi desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat diartikan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik ataupun tidak baik tidak dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi, partisipasi masyarakat, sistem keuangan desa dan transparansi. Akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik dapat ditekan dengan meningkatkan kompetensi dari aparatur desanya. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel independen lainnya yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti kepemimpinan. Kepala desa berperan sebagai pemimpin yang menjadi pengambil keputusan dan bertindak sebagai penggerak bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi yang salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa [23].

Referensi

- [1] Perbup No 22 tahun 2020, “PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 22 TAHUN 2020,”
- [2] A. Kasmawati and N.L. Yuliani, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dan Faktor Yang Mempengaruhinya,” *Bus. Econ. Conf. Util. Mod. Technol.*, 2021, [Online].

- Available: <https://journal.unimma.ac.id>.
- [3] N. Sari and J. A. Asmara, "Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *J. Islam. Financ. Account.*, vol. 3, no. 1, pp. 67–82, 2020, doi: <https://doi.org/10.24815/jimeka.v6i2.18125>.
 - [4] R. Martini, N. Lianto, S. Hartati, Z. Zulkifli, and E. Widyastuti, "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa," *J. Akad. Akunt.*, 2019, [Online]. Available: <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa>.
 - [5] E. W. Pahlawan, A. Wijayanti, and S. Suhendro, "Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa," *Indones. Account. J.*, vol. 2, no. 2, p. 162, Jul. 2020, doi: 10.32400/iaj.29261.
 - [6] N. E. Indraswari and Y. Rahayu, "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, 2021.
 - [7] K. Muh, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas keuangan Desa (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018)," *J. Ilm. Rinjani_ Universitas Gunung Rinjani*, 2019.
 - [8] Periansya and Sopiyan AR, "Dampak kompetensi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa kecamatan rambutan banyuasin," *J. Akuntansi, Politek. Negeri Sriwij.*, no. 21, p. ISSN : 2579-969, 2020.
 - [9] P. A. R. Ardianti and I. W. Suartana, "Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Impementasi Sistem Keuangan Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *E-Jurnal Akunt.*, vol. 30, no. e-ISSN 2302-8556, 2020.
 - [10] M. A. Arfiansyah, "Journal of Islamic Finance and Accounting Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *J. Islam. Financ. Account.*, vol. 3, no. 1, pp. 67–82, 2020, [Online]. Available: <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>.
 - [11] I. M. Y. D. Putra and N. K. Rasmini, "Pengaruh Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *E-Jurnal Akunt.*, vol. 28, p. 132, 2019, doi: 10.24843/eja.2019.v28.i01.p06.
 - [12] Eliana, Nurhayati, E. Gunawam, and J. Amin, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Simeulue Barat)," *JIMEBIS*, vol. 2, no. P-ISSN 2746-489X E-ISSN 2774-5864, 2021, doi: <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMEBIS/article/view/193/122>.
 - [13] I. Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25.," *Badan Penerbit Univ. Diponegoro.*, 2018.
 - [14] S. Atiningsih and A. C. Ningtyas, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)," *J. Ilmu Manaj. dan Akunt. Terap.*, vol. 10, no. 1, pp. 2015–2019, 2019.
 - [15] Zulkifli, Sandrayati, and N. Ariani, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim," *J. Ekon. Manajemen, Bisnis, Audit. dan Akunt.*, vol. 6, no. 1, pp. 26–38, 2021, doi: <http://doi.org/10.54077/jembatan.v6i1.55>.
 - [16] D. F. Puspa and R. A. Prasetyo, "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Media Ris. Akuntansi, Audit. Inf.*, vol. 20, no. 2, p. 281, 2020, doi: 10.25105/mraai.v20i2.7894.
 - [17] Y. Fitriani, N. L. Yuliani, and A. H. Purwantini, "Anteseden Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Borobudur , Kabupaten Magelang) Anteseden Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Borobudur , Kabupaten Magelang)," pp. 331–346, 2021.
 - [18] A. Lubis et al., "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa Serta Dampak Terhadap Kinerja

- Pemerintah Desa Di Kabupaten Deli Serdang,” 2020.
- [19] S. Umaira, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya),” *J. Ilm. Mhs. Ekon. Akunt.*, vol. 4, no. 3, p. 1, 2019.
- [20] Musdalifah, “Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Temon,” *J. Akunt.*, pp. 1–20, 2020.
- [21] P. A. D. R. Dewi and I. P. Julianto, “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa,” *J. Akunt. Profesi /*, vol. 11, no. 2, 2020.
- [22] N. S. Saragih and D. Kurnia, “Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang,” *Juma Unsera*, vol. 1, no. 1, pp. 1–9, 2019.
- [23] I. Pramayoga and I. W. Ramantha, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, dan Kepemimpinan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” pp. 226–237, 2019.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
